

## **FAKTOR KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI DESA BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN SEBAGAI SOLUSI KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA DI INDONESIA**

Ahmad Jamhari Rahmawan, Iedo Khrisna Lucky, Arief Nur Rakhman,  
Bagus Ferry A., dan Inggit Tutirin  
Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor

### **ABSTRAK**

*Keragaman yang dimiliki Indonesia bisa menjadi kelebihan sekaligus sebagai kekurangan. Potensi keberagaman ini jika terjalin dengan baik akan menjadi suatu kekuatan besar sekaligus kekayaan budaya yang tak ternilai harganya. Akan tetapi perbedaan ini juga berpotensi menjadi pemicu konflik. Kasus-kasus yang terjadi di Aceh, Sambas, Poso, Ambon, dan Papua serta peristiwa-peristiwa pembakaran gereja akan menjadi sejarah kelam dalam perkembangan bangsa Indonesia ke depan. Isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) yang menjadi khasanah bernegara bisa menjadi ragam mutu manikam yang menggiurkan. Sebaliknya SARA juga bisa menjadi ancaman untuk kekokohan NKRI.*

*Desa Balun, Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan adalah desa yang paling unik di Kabupaten Lamongan. Di desa ini terdapat tiga agama yang dipeluk oleh warganya, yaitu: Islam, Hindu, dan Kristen. Karena pada umumnya, untuk ukuran suatu desa di Lamongan, Desa Balun dikatakan sangat heterogen. Penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor-faktor penyebab kerukunan antar umat beragama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Metode penelitiannya adalah wawancara tokoh. Faktor yang menyebabkan kerukunan beragama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan adalah adanya faktor sejarah, sehingga ada kedekatan emosi dan komunikasi, juga faktor nilai-nilai yang tidak berbenturan yaitu Islam (NU), Kristen (GKJW), dan Hindu. Juga karena struktur masyarakat pedesaan yang masih bergantung pada tokoh.*

**Kata Kunci:** Desa Balun, Faktor kerukunan antar umat beragama, keragaman, dan konflik

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Di setiap pulau dapat ditemui adanya keragaman adat istiadat, budaya, suku, agama, dan kepercayaan. Keragaman ini menjadi suatu keunikan yang terangkum dalam negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keragaman yang dimiliki Indonesia bisa menjadi kelebihan sekaligus sebagai kekurangan. Potensi keberagaman ini jika terjalin dengan baik akan

menjadi suatu kekuatan besar sekaligus kekayaan budaya yang tak ternilai harganya. Akan tetapi perbedaan ini juga berpotensi menjadi pemicu konflik. Kasus-kasus yang terjadi di Aceh, Sambas, Poso, Ambon, dan Papua serta peristiwa-peristiwa pembakaran gereja akan menjadi sejarah kelam dalam perkembangan bangsa Indonesia ke depan. Isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) yang menjadi khasanah bernegara bisa menjadi ragam mutu manikam yang menggiurkan. Sebaliknya SARA juga bisa menjadi ancaman untuk kekokohan NKRI.

Dalam suatu negara yang majemuk seperti Indonesia sangat dibutuhkan suatu kondisi ideal yang dapat menjamin keberlangsungan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Kondisi ini menuntut adanya suatu sifat toleransi yang tinggi dalam masyarakat. Perbedaan suku, adat istiadat setempat, juga perbedaan agama yang kita peluk dan kita yakini masing-masing, bukan untuk dipertentangkan, melainkan harus diserasikan untuk mencapai cita-cita bersama menuju kebahagiaan bersama sebagai bangsa.

Kehidupan beragama di Indonesia tercermin pada eksistensi lima agama besar, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Desa Balun, Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan adalah desa yang paling unik di Kabupaten Lamongan. Di desa ini terdapat tiga agama yang dipeluk oleh warganya, yaitu: Islam, Hindu, dan Kristen. Karena pada umumnya, untuk ukuran suatu desa di Lamongan, Desa Balun dikatakan sangat heterogen. Sebagian besar desa di Lamongan penduduknya hanya terdiri atas satu rumpun yang sama, misalnya semua menganut agama Islam. Di Desa Balun, kehidupan beragamanya begitu harmonis, tidak pernah timbul pertikaian atau konflik yang mengancam. Tidak berlebihan jika desa ini bisa disebut sebagai miniatur kehidupan yang ideal berbangsa dan bernegara yang majemuk seperti Indonesia. Dari sini patut kiranya dicari faktor penyebab kerukunan masyarakatnya sehingga bisa dijadikan masukan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah dalam mengambil kebijakan tentang kerukunan antar umat beragama. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan sebuah masalah yaitu faktor apa sajakah yang menyebabkan kerukunan antar umat beragama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kerukunan antar umat beragama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Kerukunan**

Bila kita lihat ke belakang, dalam buku *Sutasoma*, terdapat konsep kerukunan yang sekarang menjadi titik pijak dalam bernegara, yaitu *Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa* (berbeda-beda itu ya tetap satu juga, ada perbedaan dalam peribadatan).

Sila ke-3 Pancasila pun menjadi landasan utama dalam menjaga kerukunan itu. Sila “Persatuan Indonesia” sendiri menyiratkan dan menyuratkan adanya kesadaran berbeda tetapi tetap satu dalam lingkup NKRI.

### **Kultur Masyarakat Indonesia**

Masyarakat Indonesia dalam sejarahnya memegang erat konsep kerukunan itu. Bahkan dalam hal masuknya agama ke nusantara ini pun hampir tidak ada konflik yang menyertainya. Walaupun penyebaran agama Kristen dibawa oleh penjajah dari Eropa, tetapi tetap saja masyarakat masih memisahkan antara penjajah dengan penyebaran Kristen di Indonesia.

Berawal dari animisme-dinamisme kemudian masuk Hindu-Budha, lalu Islam dan terakhir Kristen. Dalam banyak hal terjadi keunikan dalam praktek peribadatan dalam agama. Bedug dalam agama hindu/budha pun dipakai dalam Islam, khususnya di masjid-masjid NU (bermadhab syafi’i).

“Tasbih” yang dipakai dalam Islam, juga dipakai oleh para Bhiksu. Bentuk bangunan masjid yang berkubah secara konsep mirip dengan bangunan candi. Bahkan masjid Chang Ho di Surabaya, pola bangunannya sama dengan kelenteng-kelenteng Cina. Mereka seakan sepakat untuk memakai media yang sama, tetapi isinya berbeda.

Bahkan di Malang Selatan (Desa Sitarjo), walaupun dalam banyak hal bisa dikritisi/diperdebatkan tetapi faktanya mereka melakukannya. Di sana dipakai nama dari Kristen (untuk perawat jenazah yang beragama Kristen) (M. Zainuddin, potret kerukunan beragama warga malang selatan, dalam kompas, Kamis 2 Mei 2002).

Di Ambon ada konsep “perca gandong”, di mana mereka para pengikut Kristen merasa menjadi adik dan memanggil saudara-saudara mereka yang ada di utara yang muslim sebagai saudara tua.

Dalam konsep kerukunan kerja, beragam konsep kita temui di nusantara ini. Di Bali ada sistem pertanian “subak”, di Sulawesi Selatan kita mengenal “mapalus” (kerja bhakti), di minang ada konsep “siledburan” sejenis kerja bakti, di Jawa kita kenal “gugur gunung”. Semua konsep itu meniadakan perbedaan yang ada.

### **Konsep Kerukunan Umat Beragama di Indonesia**

Agama yang dinamis dalam berdakwah (khususnya Islam dan Kristen) memerlukan sarana untuk mengaturnya, namun sampai saat ini daftar rancangan peraturan bersama dua menteri (menteri Agama dan menteri Dalam Negeri) belum disepakati. Ada tiga konsep kerukunan umat beragama yaitu:

#### *Kerukunan Intern Umat Beragama*

Adalah kerukunan golongan yang seagama, sepertihalnya golongan Muhammadiyah dengan golongan Nahdhatul Ulama. Kedua golongan ini merupakan golongan mayoritas dalam agama Islam. Kerukunan ini bertujuan agar masing-masing golongan dalam agama dapat menjalin kerukunan dan tidak mudah terpecahkan oleh isu-isu yang dapat memecahbelah mereka.

### *Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia*

Adalah kerukunan yang dijalin antar pemeluk agama yang berbeda, seperti halnya pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama Kristen. Kerukunan ini bertujuan agar masing-masing pemeluk agama dapat hidup harmonis, selaras, dan saling hormat-menghormati.

### *Kerukunan Antar Umat Beragama dengan Pemerintah*

Adalah kerukunan yang dijalin antara pemerintah dengan seluruh pemeluk agama di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas pemerintah di sini adalah sebagai pelindung atas kebebasan warga negara dalam menentukan pilihan agama. Seperti yang termuat dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2, yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”.

Di sini dimaksudkan hubungan antara pemerintah dengan seluruh umat beragama di seluruh NKRI. Dari kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah tersebut dimaksudkan agar terjadi hubungan yang harmonis antara pemeluk agama dengan pemerintah.

## **Sejarah Kerukunan Umat Beragama di Indonesia**

### *Kerukunan Intern Umat Beragama di Indonesia*

Sejarah kerukunan intern umat beragama di Indonesia mengalami pasang surut. Mulai dari berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912 dan NU pada tahun 1926, walaupun tidak terasa aksi-aksi yang dilakukan dua golongan ini.

Aksi yang paling aktual misalnya pembakaran pemukiman kelompok sesat Ahmadiyah di Parung, Bogor dan NTB. Kasus yang serupa yaitu penyerangan ustadz oleh LDII di Karanganyar, Solo. LDII menganggap para ustadz telah mendiskreditkan golongan ini. Selain itu, perang padri antara golongan putih dan adat.

### *Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia*

Sejarah kerukunan antar umat beragama di Indonesia yang paling sering konflik adalah antara pemeluk agama Islam dengan Kristen. Contoh yang paling obyektif adalah kasus Ambon, Poso, dan pembakaran beberapa gereja di beberapa daerah di Indonesia, serta Maluku Tenggara dengan jumlah korban jiwa 59.888.

### *Kerukunan Antar Umat Beragama dengan Pemerintah*

Asal mula kerukunan umat beragama dengan pemerintah di Indonesia juga mengalami pasang surut.

#### 1) Era Orde Lama

Pada era ini agama dijadikan paham ideologi oleh Soekarno yaitu NASAKOM (Nasionalis Agama Komunis).

## 2) Era Orde Baru

Pada era ini kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah dirasakan masih kurang mantap, sebagai akibat semakin memanasnya suhu politik, terutama menjelang Pemilu tahun 1977. Umat beragama khususnya umat Islam merasakan kebebasannya untuk berdakwah sangat dibatasi, harus meminta ijin dahulu kepada aparat keamanan. Di pihak lain pemerintah memandang pembatasan kebebasan dakwah perlu dilakukan, demi terciptanya ketertiban dan keamanan yang mantap. Mengingat kenyataan masih banyak para juru dakwah yang menyalahgunakan dakwah untuk kepentingan politik praktis yang mendiskreditkan pemerintah dan pihak lain (Departemen Agama, Pedoman Dasar Kerukuna Hidup Beragama).

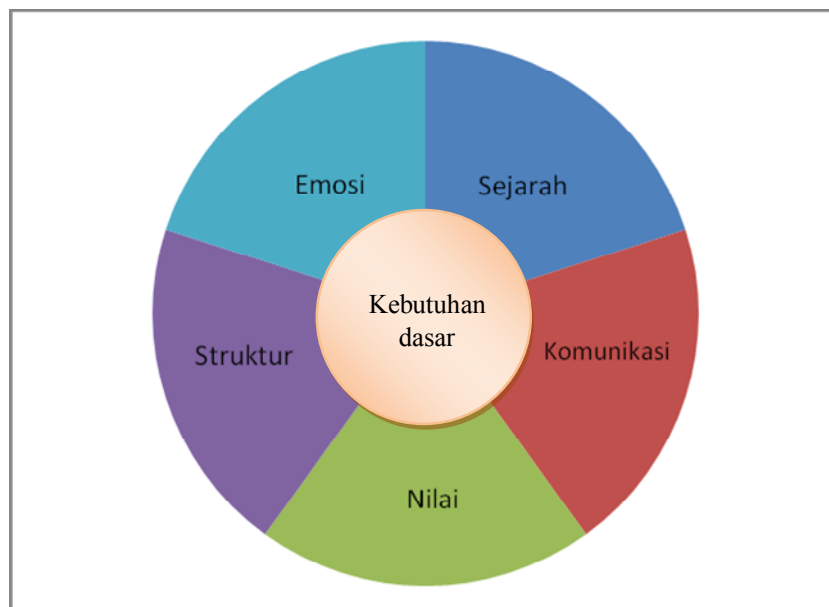
Pada era ini juga sering terjadi peristiwa yang paling membuat umat Islam berduka, seperti kasus Tanjung Priok, dan Lampung (Talang Sari).

## 3) Era Reformasi

Tuduhan-tuduhan dan penangkapan para kelompok ekstrim seperti FPI (Front Pembela Islam) dan JI (Jaringan Islamiah) oleh para aparat hukum karena kelompok itu dianggap teroris, itu sangat melukai umat Islam.

## Penyebab Konflik

Menurut Meyer (dalam Pieter, George Monoppo, 2005:7), pusat seluruh konflik adalah *human-need* yang didukung faktor nilai, struktur, sejarah, emosi, dan komunikasi. Seperti tampak pada gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik terjadi kalau salah satu hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.



## Benturan Kebudayaan dan Kebebasan Beragama

Apa yang dikemukakan oleh Huntington mengenai peranan agama dalam kemungkinan *clash of civilization* masa depan ? Kita lihat dalam masa transisi di Indonesia dewasa ini timbul ketegangan-ketegangan berupa pergeseran horizontal dalam masyarakat yang disebabkan konflik agama. Sungguh konflik yang terjadi bukanlah semata-mata konflik agama tetapi akibat benturan-benturan yang terjadi di masyarakat yang bersifat sosial ekonomi. Meskipun demikian, benturan-benturan tersebut telah menggunakan unsur agama yang menurut Huntington mempunyai akar yang sangat dalam di dalam setiap komunitas sebagai tameng pembenam upaya-upaya kriminal di dalam kehidupan bersama. Namun demikian pergeseran yang berujung pada pertentangan yang berbau agama menjadi tabu untuk diangkat ke permukaan.

Dalam buku *Kerikil-Kerikil di Jalan Reformasi* (2002) karangan William Chang, masalah agama di dalam pergeseran sosial dewasa ini tidak dibicarakan. Demikian pula di dalam tulisan yang berjudul "Dua Puluh Trend Masa Depan Dihadapi Orang-Orang Asia" yang dikemukakan oleh Ricardo Saludo dalam majalah *ASIAWEEK* Vol. 25, August 20-27, 1999. Tulisan tersebut malah menyebutkan faktor lain secara eksplisit seperti *microchip*, akal-budi, ekonomi, investor, uang, penduduk, jaringan kerja, bumi, makanan, tubuh, jenis kelamin, dinasti, jiwa metropolis, keluarga, liburan tugas-tugas, ranjang, kekuasaan, dan kelas-kelas dalam kehidupan sosial yang berpeluang menyebabkan terjadinya benturan peradaban. Dan bukan akibat perbedaan agama.

Adalah benar pengamatan Abdurrahman Wahid yang mengatakan bahwa nasionalisme dan agama di masa reformasi dewasa ini kurang diperhatikan untuk dijadikan wacana public. Indonesia mempunyai karakteristik yang khas di dalam hal kehidupan beragama (kehidupan yang serasi antara Kristen dan Islam di Indonesia, lihat Jan S. Aritorang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia* (2004). Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, namun terkenal dengan muslim moderat. Demikian pula hampir seluruh agama besar di dunia ada di dalam masyarakat Indonesia. Sejak kemerdekaannya kehidupan masyarakat di Indonesia yang multiagama diikat oleh suatu ideologi, yaitu ideologi Pancasila yang mengakui kebebasan beragama.

Upaya untuk membangun masyarakat madani bukanlah upaya yang mudah dan sekaligus tetapi membutuhkan waktu dan kesabaran yang luar biasa. Mengubah sikap fundamentalisme tidaklah terjadi dalam semalam tetapi merupakan upaya yang berkesinambungan melalui dialog, komunikasi, hidup bersama, yang penuh toleransi, dan melaksanakan tugas keseharian untuk menghadapi masalah konkret masyarakat Indonesia, yaitu memberantas kemiskinan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Membangun masyarakat madani haruslah dimulai dari organisasi masyarakat yang paling sederhana sampai yang kompleks melalui kerja sama yang nyata, dialog bersama, dan hidup bukan menutup diri tetapi membuka untuk sesama anggota komunitas yang mungkin berbeda agama dan kebudayaan. Apabila kita putus asa untuk mewujudkannya maka berarti kita lari dari permasalahan yang sebetulnya harus kita atasi. Akibatnya kekosongan yang ada akan diisi oleh sikap fundamentalisme *civil society*. Tanpa kecerdasan tidak

mungkin membangun *civil society* yang menghargai perbedaan yang ada bahkan memandang perbedaan sebagai modal komunitas Indonesia yang besar.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada pertengahan Januari sampai awal Maret 2008 (Tabel 1). Lokasi penelitian terletak di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

**Tabel 1. Program Kerja**

No	Keterangan	Januari				Februari				Maret				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5
1.	Persiapan penelitian dan penentuan judul													
2.	Survey lokasi dan tokoh													
3.	Wawancara													
4.	Analisis data													
5.	Penyempurnaan dan penyelesaian													

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara yang kami lakukan langsung kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, seperti Kepala Desa, tokoh agama Islam, Kristen, dan Hindu.

## PEMBAHASAN

### Demografi Desa Balun

Berdasarkan Buku Demografi Desa Balun Tahun 2007, jumlah kepala keluarga di Desa Balun sebanyak 1.057 KK dengan total penduduk 4.644 jiwa. Laki-laki 2.113 orang dan wanita 2.532 orang. Dari jumlah tersebut pemeluk agama mayoritas adalah agama Islam (3.513 orang), selanjutnya Kristen (863 orang), dan Hindu (287 orang).

### Sejarah Masuknya Agama di Desa Balun

#### *Sejarah Masuknya Agama Hindu*

Berdasarkan penuturan Bapak Adi Wiyono, pada tahun 1966 warga Desa Balun yang beragama Hindu (Pak Sukambang), mengajak Bapak Sulaiman untuk ikut membantu menyebarkan agama Hindu. Sebelum ini agama Hindu di Desa Balun bernama Budha Jawa Whisnu yang masuk pada tahun 1964 sesudah peristiwa G 30 S/PKI, tetapi dibubarkan pemerintah pada tahun 1974 karena pemerintah masih mengakui hanya ada dua agama yaitu Islam dan Kristen. Pada tahun 1969 umat Budha Jawa Whisnu membuat perkumpulan dan mendapat perlindungan dari kelompok Hindu Kawishon di Surabaya. Setelah itu tahun 1970

dibekukan lagi oleh pemerintah. Akhirnya para tokoh agama Hindu di Desa Balun pergi ke asrama Erlangga untuk mencari solusi yang sedang terjadi.

Setelah pergi ke asrama Erlangga, para tokoh-tokoh tadi kembali ke Balun untuk menyebarkan agama Hindu dengan dalih bahwa agama ini adalah agama peninggalan dari Majapahit (Hindu) dan pada tahun 1972 agama Hindu sudah diakui keberadaannya di Balun.

#### *Sejarah Masuknya Agama Kristen*

Agama Kristen dibawa dan disebarkan oleh warga asli pribumi (Bapak Badhi) yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa. Beliau mendapat ajaran agama Kristen dari luar Desa Balun.

Munculnya corak Kristen di Desa Balun berawal dari berdirinya gereja sekitar tahun 1966-1967. Sebelum gereja dibangun, tempat peribadatan sudah ada namun masih sederhana. Saat pembangunan gereja banyak dukungan dari pihak agama lain berupa diberikannya kesempatan izin membangun, tapi tidak dalam bentuk dana.

Berdasarkan penuturan Bapak Prayitno (tokoh agama Kristen) hubungan *intern* antar umat beragama yang satu dengan yang lain berjalan harmonis, karena hampir seluruh penduduk Desa Balun adalah saudara atau famili.

#### *Sejarah Masuknya Agama Islam*

Agama Islam di Desa Balun sudah ada sejak berdirinya desa itu. Warga Balun yang mayoritas Islam mendirikan masjid setelah peristiwa G 30 S/PKI, namun tahunnya tidak jelas.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kerukunan Beragama di Balun**

Berdasarkan pengakuan Bapak Adi Wiyono (tokoh Hindu), Bapak Suwito (tokoh Islam), Bapak Suprayitno (tokoh Kristen) serta Bapak Sudarjo (Kepala Desa Balun) terjadinya kerukunan beragama di sana karena semua penyebar agama di Desa Balun adalah orang Balun sendiri, sehingga ada ikatan keluarga dan emosi. Dalam satu keluarga bisa memiliki tiga agama yang berbeda. Apalagi penduduk Desa Balun yang Islam beraliran NU (yang mencirikan da'wah kultural) dan yang Kristen adalah GKJW (Gereja Kristen Jawa Wetan) yang tidak ortodidak, sehingga peluang terjadinya benturan dapat diminimalisir. Begitu pula hubungannya dengan penduduk yang beragama Hindu/Budha. Hal ini mirip dengan kasus di Sitarjo, Malang Selatan.

Kerukunan beragama di Desa Balun juga ada kaitannya dengan struktur masyarakat Desa Balun yang masih bersifat agraris, yang menjadikan tokoh-tokoh masyarakat sebagai panutan. Sehingga, bila tokoh-tokoh masyarakat tidak memperlmasalahkannya, maka masyarakat otomatis akan mengikutinya.

Walaupun demikian berdasarkan pengakuan Bapak Suwito (tokoh Islam) masih ada bibit-bibit konflik terutama bila komunikasi yang semestinya dilakukan, tidak berlangsung dengan baik.



Dari semua pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa faktor yang menyebabkan hubungan antar agama di Desa Balun berjalan harmonis adalah sejarah para perintisnya yang asli orang Balun. Sehingga terdapat ikatan emosi yang kuat, komunikasi yang lancar, dan ditambah dengan nilai-nilai yang masih dijiwai kultur pedesaan sehingga masyarakatnya masih sangat bergantung pada tokoh-tokohnya.

## **KESIMPULAN**

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab kerukunan antar umat beragama di Desa Balun adalah:

1. Faktor sejarah, sehingga ada kedekatan emosi dan komunikasi
2. Nilai-nilai/pengikut agama di Desa Balun semuanya (NU, GKJW, dan hindu) berakar pada kultur yang kental pedesaan.
3. Struktur masyarakat pedesaan masih bergantung pada tokoh.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Imam Wahyudi, MS selaku pendamping PKM-AI dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan karya ilmiah ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

[Anonim]. 1983. *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*. Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama.

[Anonim]. 1998. *Agama dalam keragaman Etnik di Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI.

[Anonim]. 2002. *UUD '45 yang diamandemenkan*. Surabaya: Myhda.

Hidayatullah, Edisi 11/XIV Maret 2002.

Hidayatullah, Edisi 12/XIV April 2002.

Koentjaraningrat. 1980. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.

Manopo, Piter George, S.Si, S.IP M.Psi.T. 2005. *Refolusi Konflik Interaktif Berbasis Komunitas Kabar*. Surabaya: PT. Dieta Pratama.

Sabili, No. 22 tahun XI 21 Mei 2004.

Saly, No. 8 tahun VII 19 Januari 2005.

Soepono. 1986. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Paramita.

Sudiyat, Iman. *Membina Hukum Adat di dalam Negara Hukum Pancasila*. Nijmegen: Kertas Kerja dalam Konferensi Ilmiah “Perhimpunan Pelajar Indoensia se-Nederland.”

Suprayogo, Imam. 2001. *Merajut Benang Kusut Agama-agama dalam Islam dan Hegemoni Sosial*. Khaeroni (ed.). Jakarta: Ditperta Depag RI.

Tilaar, H.A.R. 2004. *MULTIKULTURALISME, Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.